

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini era globalisasi terus berkembang dengan pesat sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi semakin berjalan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perkembangan ini meningkatkan para masyarakat terus ikut berupaya dengan maksimal agar dapat memperbaiki kondisi perekonomian. Setiap daerah memiliki hak otonomi, dimana hak otonomi tersebut merupakan kewenangan yang di peroleh melalui pemerintah daerah atau pusat yang berfungsi sebagai pengatur serta mengurus berbagai urusan yang ada di wilayah atau provinsi guna untuk peningkatan kemandirian daerah. Tujuan adanya otonomi daerah tidak lain untuk mengatur keuangan daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik lagi terutama di bidang perekonomian, karena keuangan daerah merupakan independensi daerah otonom dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak serta retribusi sebagai pendapatan daerah. (Arina, 2019)

Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki banyak Kabupaten/Kota berasal dari 34 Provinsi dengan kewenangan masing-masing untuk mengatur pemerintahannya sendiri, dimana dengan adanya otonomi daerah saat ini mengharuskan setiap daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki sekaligus mengelola keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan tepat guna demi mewujudkan kemandirian pemerintahan melalui perekonomian yang stabil. (Wulandari, 2021)

Tujuan otonomi daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah dapat direalisasikan dengan peningkatan upaya pajak daerah yang dipungut berdasarkan kegiatan-kegiatan peningkatan potensi daerah. Pemerintah daerah memerlukan adanya peningkatan upaya penerimaan pajak daerah yang merupakan sumber terbesar dalam kontribusi terhadap Pendapatan Daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi suatu proses perubahan keadaan perekonomian

suatu negara secara berkelanjutan menuju ke arah yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga bisa disebut sebagai proses meningkatnya jumlah produksi suatu perekonomian yang ditunjukkan dari meningkatnya pendapatan nasional (Wardhana, 2021)

Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah pengeluaran pemerintah (government expenditure). Besar kecilnya pengeluaran pemerintah sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh pemerintah itu sendiri dalam kurun waktu tertentu. Di era otonomi daerah maka sumber pendapatan daerah terdiri atas PAD, DBH, DAU, dan DAK. Semakin besar pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah akan semakin baik sebab mempengaruhi secara positif pembiayaan pembangunan ekonomi di daerah, dalam arti bahwa belanja pemerintah untuk pembangunan ekonomi juga akan semakin besar sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan. (Sinaga, 2020)

DAK atau di sebut sebagai Dana Alokasi Khusus yang menjadi bagian dari sarana pemerintah untuk pembangunan perekonomian, dimana dana yang bersumber dari APBN tersebut dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana DAK berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu/khusus(Hermawan et al., 2022).

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah yang mana akan teralokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan yang berlaku, transfer pemerintah pusat tersebut menjadi suatu sistem pembiayaan yang mencakup pembagian anggaran dan pemerataan antar daerah searah tanggungjawab dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan. Respon setiap daerah terhadap dana transfer cenderung beragam dikarenakan potensi sumberdaya dan permasalahan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya sehingga dana transfer diharapkan dapat mengurangi kesenjangan

fiskal antar daerah dan mampu memenuhi kebutuhan fiskal yang belum dapat dipenuhi dengan pendapatan asli daerah(Pradana & Handayani, 2023).

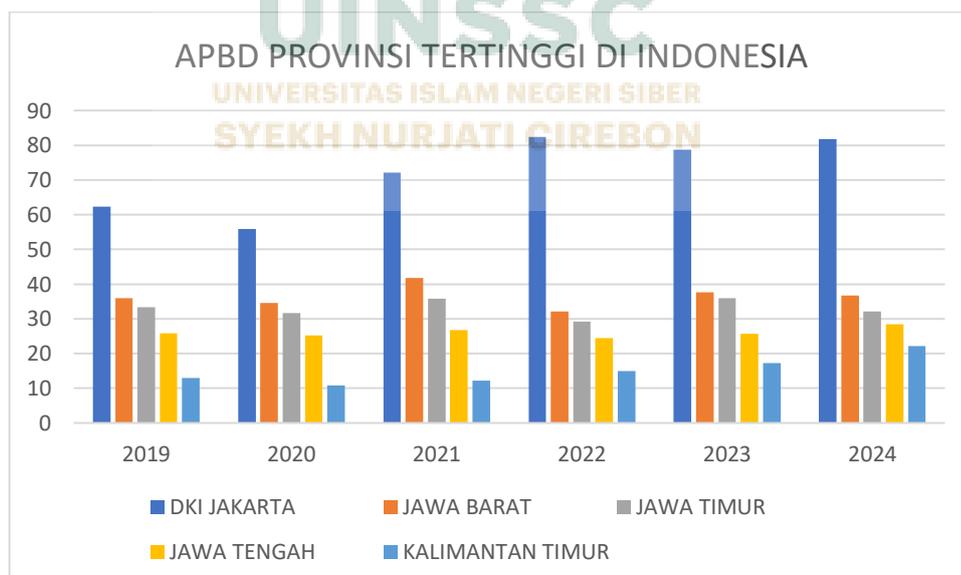
Pemerintah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Dana Perimbangan dan transfer lainnya merupakan anggaran transfer ke daerah dalam APBN sebagai salah satu wujud dari komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. (Susilo, 2022)

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk memandirikan pemerintah daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan peran serta masyarakat demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sistem desentralisasi ini juga dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur urusan pemerintahan dengan menggunakan wewenang, sumber keuangan, pemanfaatan SDA, dan sumber daya lainnya yang dimiliki daerah dengan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat pada daerah otonom tersebut. (Orisu, 2021)

Dana transfer yang diberikan pusat kepada pemerintah daerah dapat menjadi stimulus maupun substitusi bagi upaya peningkatan pendapatan daerah (Azwar, 2023). Dana transfer memberi efek stimulus jika daerah mampu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui peningkatan upaya pajak, sementara itu efek substitusi terjadi jika terjadi penurunan pendapatan daerah karena daerah lebih banyak menggunakan dana transfer dari pusat untuk mendanai keperluannya. Kemudian pada Dana Alokasi Khusus yang dapat di ketahui melalui pertumbuhan ekonomi mencakup sarana fisik yang ada pada sarana jalan umum, sistem pendidikan, transportasi bahkan mencakup

pedesaan. Pada sarana DAK non fisik akan mencakup sebuah bantuan operasional kesehatan yang berbentuk BPJS kesehatan/ketenagakerjaan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Pengalokasian dana secara khusus akan membangun perekonomian menjadi lebih baik dan berkembang, karena pada dasarnya pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sehingga pertumbuhan ekonomi melalui sarana pengalokasian dana khusus menjadi upaya pemerintah khususnya wilayah Jawa Barat menjadi lebih baik lagi (Marheni & Triyanto, 2023).

Dengan daerah yang memiliki APBD tertinggi kedua di Indonesia selama 5 tahun terakhir Provinsi Jawa Barat sangat potensial membangun dan menumbuhkan perekonomian. Provinsi Jawa Barat hanya terpaut satu posisi dengan Provinsi DKI Jakarta, diposisi ketiga ada Provinsi Jawa Timur, diposisi keempat ada Provinsi Jawa Tengah, dan diposisi kelima ada Provinsi Kalimantan Timur.



PROVINSI	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DKI JAKARTA	62,3	55,8	72,1	82,4	78,7	81,7
JAWA BARAT	36	34,5	41,7	32,1	37,7	36,7
JAWA TIMUR	33,4	31,6	35,8	29,2	36	32,1
JAWA TENGAH	25,8	25,3	26,7	24,5	25,7	28,5
KALIMANTAN TIMUR	13	10,8	12,2	14,9	17,2	22,1

Sumber : Kompas, 12 September 2024 (Dalam Triliun)

Jika dilihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Provinsi wilayah Jawa Barat terdapat sebuah informasi yang menjelaskan pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2013-2018.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013 s/d 2018**

Tahun	Pendapatan Daerah
2013	19.237.611.310,00
2014	22.310.953.031,23
2015	23.814.831.622,95
2016	27.694.035.120,86
2017	24.054.880.848,03
2018	33.919.022.032,34

(Sumber : Jabar BPS)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pendapatan daerah yang terhitung dari tahun 2013 sampai tahun 2018 di provinsi jawa barat selalu mengalami kenaikan, meski pendapatan daerah pada tahun 2017 mengalami penurunan namun pada tahun 2018 pendapatan anggaran mengalami kenaikan kembali sehingga penurunan tersebut masih dalam kategori baik. Dalam hal ini pendapatan daerah mengalami kestabilan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan pemerintah pusat dapat mengalokasikan dananya dengan baik kepada setiap sarana yang di tuju.

Pertumbuhan ekonomi sangat di butuhkan bagi setiap daerah terutama bagi negara, karena jika pertumbuhan ekonomi yang berjalan dengan sangat stabil maka kondisi pada wilayah tersebut sangat berkembang dan mendekati

wilayah yang makmur dari segi perekonomian. Anggaran yang di kelola dari banyaknya dana yang masuk tidak lain di sesuaikan melalui program wajib pajak, pajak daerah tersebut akan di kelola menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak daerah berdasarkan UU No. 29 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan tanpa imbalan langsung yang seimbang dan digunakan oleh daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat(Syam & Zulfikar, 2022).

Transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan bersumber dari APBN yang kemudian diberikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhannya. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan untuk meminimalisir kesenjangan fiskal yang terjadi antar pemerintah daerah terutama mencakup Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan karena mengatur mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas dari sistem keuangan sebagai penanganan suatu masalah yang akan muncul di kemudian hari. Namun, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari adanya transfer antar pemerintah pada kenyataannya hal itu menimbulkan ketergantungan pemerintah daerah akan adanya transfer berupa dana perimbangan dan tidak mengoptimalkan upaya peningkatan DAK sebagai tolak ukur berkembangnya suatu daerah, karena Dana Alokasi Khusus merupakan dana APBN yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan secara khusus, baik secara fisik maupun non fisik(Sisilia & Harsono, 2021).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Irmal Suandi (2016) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus akan menciptakan sebuah pertumbuhan perekonomian yang baik, dimana setiap kenaikan dana alokasi khusus maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Andri Gustaf Eka Saputra (2020) Secara Simultan ketiga variabel Independent yaitu DAU, PAD, dan DAK berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitasnya sebesar 0,7240 ($0,7240 > 0,05$).

Kemudian pada penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Abdul Malik Ridho (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan semakin timpang sehingga kondisi ketimpangan tersebut akan menurunkan pendapatan masyarakat.

Permasalahan yang ada saat ini yaitu munculnya ketergantungan pemerintah daerah yang disebabkan alokasi transfer yang diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan konsumtif masyarakat. Yang mana pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat akan mengalami penurunan dan hal tersebut berkaitan dengan penerimaan daerah, penurunan tersebut apabila di biarkan maka akan mengurangi pasokan dana yang ada. Pada permasalahan yang terjadi jika dana transfer tidak di atur sebagaimana mestinya akan terjadi sebuah ketidakseimbangan bidang fiskal antara pusat dan daerah. Sedangkan dari yang tidak teralokasikan dengan baik akan membuat suatu daerah tidak akan berkembang, terutama di bidang ekonominya.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Perkembangan Ekonomi wilayah jawa barat melalui laporan data dari BPS sehingga data yang di peroleh valid, dari kedua variabel akan di analisis sehingga judul pada penelitian ini **“Pengaruh DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Dana Transfer Pemerintah Pusat Sebagai Variabel Intervening”**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diketahui berdasarkan pencatatan laporan keuangan, oleh karena itu dapat diketahui identifikasi masalahnya sebagai berikut :

- a. Terjadi penurunan pendapatan negara pada tahun 2017 pada wilayah jawa barat
- b. Dana APBN masih berkembang
- c. DAK masih belum berjalan dengan optimal
- d. Dana transfer dari pusat tidak di ikuti dengan besarnya pengeluaran dalam bentuk belanja modal.

Maka dari itu, berdasarkan dengan identifikasi masalah tersebut perlu di lakukan penelitian mengenai variabel pertumbuhan ekonomi yang dapat di lihat melalui data kementerian keuangan, dan BPS yang terhitung dari tahun 2013 s/d 2022 sehingga dapat di ketahui perkembangan ekonomi melalui Dana Alokasi Khusus, dan Dana Transfer Pemerintah Pusat.

2. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini membatasi permasalahan agar pembahasannya tidak terlalu meluas dan memudahkan proses penelitian, dimana hanya mencakup mengenai 3 variabel saja yaitu mengenai DAK (X), Pertumbuhan Ekonomi (Y), Dana Transfer Pemerintah Pusat (Z).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ada, agar memudahkan penulisan dalam penelitian ini maka, penulis membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu :

- a. Apakah DAK memiliki pengaruh terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat di Provinsi Jawa Barat?
- b. Apakah Dana Transfer Pemerintah Pusat memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat?
- c. Apakah DAK memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Dana Transfer Pemerintah Pusat di Provinsi Jawa Barat?
- d. Apakah DAK dan Dana Transfer Pemerintah Pusat memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh DAK terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat di Provinsi Jawa Barat.
- b. Untuk Mengetahui pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat.
- c. Untuk mengetahui pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Dana Transfer Pemerintah Pusat di Provinsi Jawa Barat.
- d. Untuk Mengetahui Pengaruh DAK dan Dana Transfer Pemerintah Pusat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoretis tentang teori-teori DAK Dan teori-teori Dana Transfer Pemerintah Pusat terutama pada bidang Pertumbuhan Ekonomi.

Berikutnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk menguatkan penelitian yang akan dilakukan seputar Pengaruh DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Dana Transfer Pemerintah Pusat atau penelitian serupa.

b. Praktis

Bagi Mahasiswa

Penelitian ini merupakan salah satu cara dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan lima bab utama diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai pendahuluan yang mencakup pembahasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas tentang teori DAK, pertumbuhan ekonomi, dana transfer pemerintah pusat serta konsep dan hubungan yang mendukung variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Membahas mengenai metode penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait deskripsi data hasil penelitian dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian serta menguraikan terkait pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Pada bab penulis menguraikan kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran.

